

MODEL KONSEPTUAL PERENCANAAN PROGRAM DESA VOKASI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN BOGOR MELALUI PROGRAM KEMITRAAN

Masitowati Gatot¹, Syarifah Gustiawati Mukri²
Universitas Ibn Khaldun Bogor
masitowati@uika-bogor.ac.id¹, syarifah@fai.uika-bogor.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model konseptual Perencanaan Program Desa Vokasi Pada Lembaga Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bogor Melalui Program Kemitraan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor dengan Teknik Purposive sampling, pendekatannya deskriptif kualitatif. Desa vokasi dengan program kemitraan merupakan salah satu model konseptual yang dikembangkan untuk menekan angka kemiskinan dalam penelitian ini, dengan SPNF SKB sebagai pusat Pendidikan.

Kata Kunci : Program kemitraan, Desa Vokasi, Pusat Pendidikan

1. Pendahuluan

Peningkatan angka pengangguran, menambah riwayat angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Barat, pada tahun 2013, persentase jumlah penduduk miskin kota adalah 8,69%, sedangkan untuk penduduk miskin desa adalah 11,42% dari jumlah penduduk Jawa Barat 438.265.000 jiwa. (BPS, 2016). Ketimpangan tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia potensial, karena tidak memiliki kemampuan, skill/ketrampilan dan modal. Pengembangan

desa vokasi dapat menjadi pendekatan alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut, karena dapat memberi peluang untuk mengurangi pengangguran dan mampu meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat. (Malik dan Dwiningrum, 2014). Program desa vokasi dilaksanakan dengan memberikan berbagai pelatihan dan mentoring kewirausahaan kepada masyarakat dengan melihat potensi lokal yang dimilikinya.

Seperti halnya di Desa Kopeng Kabupaten Semarang, yang telah menyulap desanya menjadi

desa vokasi melalui pengembangan desa wisata, karena potensi alam yang dimilikinya (Blog wisata Kopeng, 2009). Sebagaimana pula Kecamatan Kebag Kabupaten Kudus, telah menyulap sembilan desanya dengan program desa vokasi berbasis kewirausahaan (Hadi, 2016). Demikian pula di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Jawa Tengah, yang telah berhasil menyulap desanya menjadi desa vokasi berbasis kewirausahaan (Saktyawati dkk, 2013). Program desa vokasi tersebut telah dilakukan di beberapa wilayah lainnya seperti kabupaten Kendal (Lutfiyah, 2013). Kabupaten Wonosobo, (Usman dan Pakarti, 2016). Kabupaten Demak (Priyantika dkk, 2013). Dengan demikian, beberapa keberhasilan hasil program desa vokasi tersebut di atas, dapat diikuti oleh masyarakat desa lainnya.

Beberapa keberhasilan program desa vokasi di beberapa wilayah tersebut, lebih menekankan pada pendekatan kewirausahaan untuk membentuk usaha baru atau pengembangan usaha masyarakat suatu wilayah. Usaha-usaha baru kemudian terbentuk sesuai dengan target program yang telah disusun sebelumnya. Namun, masalah yang kemudian muncul adalah wilayah yang sudah dijadikan percontohan desa vokasi, tidak dibekali kemampuan membentuk center of education, sehingga keberhasilan- keberhasilan yang sudah diraih, tidak bisa ditularkan kembali kepada desa-desa lainnya. Dengan adanya Satuan Pendidikan Non Formal-Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) di setiap kabupaten, seharusnya mampu menjadi manager center of education yang berperan dalam mendidik, membina dan mengawasi serta mengelola hasil produk desa vokasi, sehingga mampu menjadi suplier sumber daya manusia yang siap bekerja dan bahkan menjadi wirausahawan baru untuk desa-desa lainnya. Salah satu cara yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa, adalah dengan memberikan keterampilan (*skill*) dan menggali potensi sumberdaya alamnya. Dengan modal pemberian keterampilan tersebut,

menjadi salah satu program unggulan dari SKB yang berada di setiap kabupaten.

Upaya Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, merupakan kelanjutan dari program Kementrian Pendidikan Nasional, bidang Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, melalui pengembangan program desa vokasi. Program tersebut diharapkan mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan yang tinggi di pedesaan, sehingga dapat melahirkan wirausahawan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif di suatu desa yang dapat dijadikan sumber potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Kabupaten Bogor memiliki Satuan Kegiatan Non Formal, dikenal dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berperan sebagai komplemen, suplemen dan pengganti. Peran komplemen akan memberikan pengetahuan

dan keterampilan yang belum diberikan oleh sekolah. Peran suplemen, berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar baik untuk memperluas maupun memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh dari sekolah. Peran pengganti berarti memberikan layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang putus sekolah atau tidak sekolah karena alasan sesuatu hal, sehingga tidak berkesempatan memasuki lembaga pendidikan sekolah formal.

Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal sebenarnya dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, melalui kegiatan-kegiatan pembinaan maupun pemberian keterampilan bagi masyarakat. Dalam hal bentuk usaha mandiri, sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun keberhasilan berkesinambungan belum terlihat hasilnya secara optimal. Adanya kelemahan- kelemahan bagi usaha mandiri tersebut, perlu diatasi dengan

mengoptimalkan usaha yang telah berjalan atau yang akan berjalan, sehingga apa yang dihasilkan sesuai dengan keinginan bersama. Sebagaimana di kabupaten Bogor dahulu banyak terdapat pohon bambu, sehingga masyarakat dibina untuk membuat kerajinan dari bamboo, seperti kursi, meja dan sebagainya. Namun seiring waktu berlalu, pohon bambu sudah tidak ada lagi sehingga produsen harus mengambil bambu dari luar kabupaten Bogor dan hasil produksinya dijual di luar kabupaten Bogor, yang secara ekonomis tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya, perlu dibentuk suatu program desa vokasi yang berfungsi untuk mengakomodir usaha bagi masyarakat, agar dapat berperan optimal. Sehingga, SKB memiliki peran strategis dalam rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Pendidikan masyarakat yang beragam, bahkan tidak lulus tersebut, menekan Lembaga SKB untuk mencari alternatif untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan melalui pembekalan ketrampilan sederhana dimana tidak dibutuhkan kualifikasi pendidikan, tetapi memberikan bekal dalam bentuk ketrampilan untuk modal mereka mencari uang. Menurut Ahyar sebagai staff pamong di SBK Kabupaten Bogor, dirinya telah menginisiasi usaha mandiri masyarakat, seperti usaha kripik dengan meningkatkan nilai jual 1000-5000 perbungkus, usaha ini dilakukan di desa Babakan Madang, namun usahanya tidak seperti yang diharapkan, semangat pada awalnya saja, tapi kemudian tidak optimal atau bahkan banyak yang tidak berproduksi lagi, karena kurang permodalan dan kendala pemasarannya.

Untuk mengantisipasi hal ini, perlu dipikirkan bagaimana cara agar usaha- usaha yang sudah ada direvitalisasi kembali atau membuat usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Maka, perlu optimalisasi program desa vokasi yang mampu mengelola usaha berbasis masyarakat dari hulu ke hilir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa

vokasi dikembangkan melalui pendekatan kawasan pedesaan, yang memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, sehingga diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha berbasis nilai- nilai budaya setempat. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya.

Diantara faktor yang menjadi kendala lembaga SKB di Kabupaten Bogor, antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang produktif di desa serta terhambatnya permodalan, menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian model konseptual perencanaan program desa vokasi di SPNF-SKB Kabupaten Bogor. Penelitian model konseptual ini diharapkan menjadi langkah awal bagi SPNF-SKB Kabupaten Bogor dalam mewujudkan lembaga SKB menjadi center of education, melalui berbagai pendekatan pendidikan seperti Pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan kewirausahaan, pendidikan ketrampilan, menyediakan fasilitas lab ketrampilan, serta penggunaan perangkat teknologi informasi.

Pembentukan kelompok-kelompok usaha masyarakat tersebut, fokus pada potensi lokal daerah, seperti hasil produk makanan tradisional, kerajinan tangan, konveksi baju, bahkan sampai usaha kreatif lainnya, tentunya yang berdaya dan bernilai jual, serta menjadi sentra usaha kegiatan pemasaran bagi masyarakat, remaja usia produktif, bahkan dapat memasarkan produk-produk mereka dari desa vokasi.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena bertujuan untuk mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang diyakini memberi dampak terhadap kondisi pencapaian target desa vokasi dan kendala apa saja yang akan dihadapi, kemudian mendeskripsikan tahapan perencanaan program desa vokasi di SKB

Kabupaten Bogor, serta bertujuan untuk menemukan model konseptual program desa vokasi, melalui program kemitraan dibawah binaan lembaga SPNF-SBK Cibinong Bogor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini temanya khusus dan alamiah, sehingga dideskripsikan ke dalam bentuk kata-kata atau bahasa, tidak menggunakan angka-angka, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2005:6). Peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan bagaimana Model Konseptual Perencanaan Program Desa Vokasi di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor, Melalui Model Kemitraan. Sumber data pada penelitian ini berupa orang, literatur, kegiatan atau dokumentasi (arsip). Subyek penelitian diperlukan sebagai pemberi keterangan mengenai informasi-informasi atau data- data yang menjadi sasaran penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta menggunakan alat instrument seperti pedoman wawancara, observasi, tape recorder, kamera, dan alat tulis lainnya (Moleong, 2005: 165-170). Adapun responden yang terlibat antara lain, kepala lembaga SKB, pamong, staff dinas pendidikan PKBM dan bidang Pendidikan masyarakat untuk memperoleh data tentang partisipasi perencanaan program, tahapan perencanaan, model kemitraan, mekanisme kemitraan, faktor pendukung dan penghambat kemitraan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tehnik analisis data kualitatif, yaitu melaporkan data secara apa adanya kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari hasil pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dari hasil wawancara dengan responden dan observasi yang kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan dari jawaban yang diperoleh.

Teknik triangulasi sumber data mengutamakan check- recheck, cross-recheck antar sumber informasi satu dengan lainnya (Moleong, 2000: 178).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses perencanaan program desa vokasi, dibutuhkan model konsep yang terbagi ke dalam dua tahap umum. Tahap pertama melibatkan pencipta model konseptual awal yang menunjukkan apa yang sedang terjadi di lokasi sebelum dimulai kegiatan. Tahap kedua, meliputi penempatan model konseptual awal sebagai dasar dan kemudian menambahkan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, sehingga dapat mempengaruhi situasi di lokasi kegiatan. Menurut Jan Jonker, dkk: 2011, model konseptual erat hubungannya dengan teori literatur yang digunakan.

Pendekatan tersebut dapat membantu peneliti dalam melihat fenomena empiris, membantu menata masalah, mengidentifikasi faktor-faktor relevan, serta memberikan koneksi yang membantu peneliti memetakan masalahnya, yang kemudian dihubungkan dalam sistem teori, dengan masukan teoritis tersebut dapat memberitahu dimana harus mencari, apa yang harus dicari dan bagaimana melihat suatu masalah. Menurut Putu Sudira: 2012, vokasional merupakan proses pengenalan subyek praktis keduniakerjaan melalui kunjungan industri, pemberian bimbingan kejuruan dan pemberian pengajaran dan pelatihan terapan kepada masyarakat. Sedangkan program desa vokasi adalah program yang berusaha mengembangkan kawasan pedesaan melalui berbagai kegiatan keterampilan (vokasi) dan kelompok-kelompok usaha, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui karya yang bermutu tinggi berbasis kearifan lokal (Kemendikbud, 2013). Serangkaian proses kegiatan belajar mengajar tersebut berupa pelatihan-pelatihan atau kursus yang bersifat teknis dan berbasis produksi, yang diberikan kepada masyarakat.

Harapan dari program desa vokasi, adalah warga dapat belajar dan berlatih menguasai ketrampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber yang ada disekitarnya, dengan demikian terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi. Program peningkatan ekonomi di SKB kabupaten Bogor, awalnya berbentuk program usaha mandiri, namun belum berjalan secara optimal karena kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusianya. Oleh karenanya, diperlukan partisipasi peran akademisi, mahasiswa dan praktisi industri sebagai mitra, sehingga upaya pemberdayaan, penguatan dan pengarahan kepada lembaga tersebut, pada akhirnya dapat menjadi centre of education di kabupaten Bogor.

Sebagaimana pendapat Putu Sudira, 2012, bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan terbentuknya keterampilan, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha atau industri, diawasi oleh masyarakat dunia usaha dan industri dalam kontrak dengan lembaga- lembaga asosiasi profesi serta berbasis produksi. Menurut kutipan Ivan Hanafi dalam Bennet: 2003, pendidikan vokasi adalah segala bentuk pendidikan yang bersifat keteknikan dan diselenggarakan oleh berbagai bentuk institusi pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat, berbentuk formal maupun non formal dengan tujuan untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan dan pelatihan berdasarkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat.

Dari serangkaian pengertian vokasi di atas, maka vokasi ialah serangkaian proses kegiatan belajar mengajar berupa pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis dan berbasis produksi, yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing dalam dunia kerja.

Prinsip Vokasi

Menurut teori Prosser dan Allen yang dikutip oleh Putu Sudira, prinsip-prinsip dasar pendidikan vokasi yaitu (Putu Sudira, 2013): Pertama, Pendidikan vokasi adalah pendidikan ekonomi karena pendidikan vokasi berangkat dari kebutuhan pasar kerja yang bertujuan mensejahterakan ekonomi masyarakat, yang otomatis akan meningkatkan perekonomian negara dan akan mendorong kemajuan negara. Kedua, Pendidikan vokasi harus memperhatikan permintaan pasar. Sebab semakin tinggi permintaan pasar, maka akan semakin tinggi relevansi pendidikan vokasi di masyarakat. Ketiga, Pendidikan vokasi akan efisien jika dibuat replika lingkungan sesuai dengan tempat nantinya ia akan bekerja. Dengan replika lingkungan yang sesuai dengan vokasi, maka diharapkan peserta didik akan lebih mudah berinteraksi dengan situasi nyata dan kontekstual. Keempat, Pendidikan vokasi akan lebih efisien jika dalam pelaksanaannya, peserta didik diberikan latihan dengan cara, alat dan mesin yang sama di tempat kerja. Sehingga nantinya peserta didik menjadi lebih siap jika berinteraksi dengan situasi yang nyata. Berdasarkan dari prinsip vokasi tersebut diberikan kesimpulan bahwa pendidikan vokasi harus berawal dari kebutuhan pasar, permintaan pasar, sesuai dengan replika lingkungan tempat mereka bekerja, serta diberikan alat,cara dan mesin yang sama di tempat dia bekerja.

Tujuan Vokasi

Tujuan pendidikan vokasi menurut Gray and Herr (1998) sebagaimana dikutip oleh Ivan Hanafi mempunyai dua misi; pertama, mendorong peserta didik lebih berdaya saing dalam pekerjaan, sehingga dapat mencapai karir, tujuan untuk kelayakan hidup. Kedua adalah meningkatkan perekonomian lebih kuat dalam persaingan internasional melalui peningkatan keterampilan pekerja dan produktivitasnya. (Putu Sudira, 2013) Sedangkan Putu Sudira mendeskripsikan tujuan vokasi

ialah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan bimbingan vokasi dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga mampu mendorong pembangunan negara yang berkelanjutan. (Putu Sudira, 2013).

Konsep Perencanaan Program

Perencanaan merupakan proses sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 2004: 57). Sebagaimana pendapat Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin, 2005: 17) bahwa perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan.

Menurut Siagian (1983), perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan dimasa mendatang (Endang Soenarya, 2000: 37). Pengambilan keputusan dalam perencanaan dilaksanakan secara sistematis, rasional dengan menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan dan dapat dibenarkan secara ilmiah. Pendapat- pendapat di atas disimpulkan bahwa perencanaan berkaitan

dengan pengambilan keputusan untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencapai tujuan dimasa mendatang. Pengambilan keputusan dalam perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan, baik tujuan umum atau tujuan khusus organisasi atau lembaga. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. "Begitu pentingnya sebuah perencanaan sehingga dikatakan apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar sesungguhnya sebagian besar pekerjaan telah selesai dilakukan" (Didin Kurniadin, 2013: 139) Tipe-tipe Perencanaan Menurut Friedman (1973) perencanaan alokatif dikategorikan dalam empat tipe (Sudjana, 2004:66).

a. Perencanaan berdasarkan Perintah (*Command Planning*)

Perencanaan berdasarkan perintah ditandai dengan ciri birokratik yang kuat. Perencanaan Command Planning berorientasi pada rencana umum yang telah disusun berdasarkan patokan-patokan yang telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga tingkat atas yang memiliki wewenang memberikan perintah. Alat utama dalam perencanaan tipe ini adalah sanksi. Para perencana di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk menjabarkan tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh lembaga tingkat atas. "Tipe perencanaan berdasarkan perintah sangat erat hubungannya dengan sistem pemerintahan yang terpusat (sentralisasi)" (Sudjana, 2004: 67).

Lembaga pemerintah di tingkat pusat menyusun rencana umum tingkat nasional sebagai bahan rujukan bagi rencana di lembaga-lembaga tingkat daerah. Rencana umum tingkat pusat berkaitan dengan pencapaian tujuan nasional. Patokan perencanaan dan tolok ukur keberhasilan dalam perencanaan rencana ditetapkan oleh lembaga tingkat pusat.

Berdasarkan rencana dan patokan perencanaan yang telah ditetapkan oleh lembaga pusat, lembaga tingkat daerah menyusun rencana yang harus merujuk kepada rencana yang ditetapkan tingkat nasional. Semua rencana dan pelaksana di tingkat daerah berkewajiban untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh tingkat pusat. Pengawasan oleh tingkat pusat dilakukan melalui inspeksi yang berimplikasi pada peringatan teguran, ancaman dan bahkan hukuman.

b. Perencanaan berdasarkan Kebijakan (*Policies Planning*)

Perencanaan tipe ini mendasar pada kebijakan-kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk terwujudnya proses pengambilan keputusan mengenai rencana yang merujuk kepada kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta lembaga penyelenggara program. Dengan demikian, kegiatan perencanaan

berdasarkan kebijakan dilakukan melalui upaya memadukan berbagai kebijakan dengan kepentingan lembaga di tingkat pusat dan daerah (Sudjana, 2004: 69). Perencanaan berdasarkan kebijakan hampir sama dengan perencanaan berdasarkan perintah, yaitu perencanaan di tingkat daerah dititikberatkan pada penjabaran kebijakan dari lembaga- lembaga di tingkat pusat. Akan tetapi, perencanaan tipe ini memberi kewenangan kepada lembaga di tingkat daerah untuk menjabarkan dan menyesuaikan kebijakan tingkat pusat dengan daerah masing-masing.

Perencanaan tipe ini mengarah pada kepentingan dan kondisi daerah (desentralisasi). Secara sederhana perencanaan berdasarkan kebijakan berkaitan dengan upaya penjabaran kebijakan dari tingkat pusat dengan memperhatikan kondisi daerah masing- masing (Sudjana, 2004: 71)

c. Perencanaan berdasarkan Persekutuan (*Corporate Planning*)

Perencanaan berdasar persekutuan lebih menitikberatkan pada hubungan antar berbagai pihak baik dalam menentukan tujuan maupun dalam menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tipe ini adalah lembaga-lembaga atau Organisasi swasta dan kemasyarakatan yang mempunyai kaitan antara yang satu dengan lainnya. Cara yang biasa digunakan dalam kegiatan perencanaan adalah dengan saling mengajukan usul gagasan, pendapat dan alasan-alasan diantara pihak- pihak yang bekerjasama (Sudjana, 2004: 72).

Pada tipe perencanaan persekutuan pengambilan keputusan tidak dilakukan sebelum semua pihak menyepakati melalui proses perundingan dan hasil keputusan dalam perundingan diwarnai tawar menawar mengenai kepentingan masing-masing dan setiap pihak menggunakan kekuatan dan pengaruhnya. Dengan demikian proses kegiatan yang dilakukan antar dan oleh pihak yang bersekutu menjadi ciri utama tipe perencanaan ini.

Perencanaan berdasarkan Kepentingan Peserta terjadi apabila proses pengambilan keputusan mengenai rencana untuk memecahkan masalah nasional ditawarkan atau diserahkan oleh lembaga tingkat nasional kepada lembaga yang dibentuk masyarakat (Sudjana, 2004: 76).

Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dimaksud antara lain koperasi, himpunan petani, rukun tetangga, ikatan pelajar dan mahasiswa, organisasi pemuda dan wanita, persatuan keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat. Perencanaan tipe ini memiliki tiga ciri umum. Pertama, wewenang untuk mengambil keputusan diserahkan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kedua, terjadi partisipasi aktif setiap peserta dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, pengawasan terhadap perencanaan dilakukan secara sukarela oleh masyarakat sendiri (Sudjana, 2004: 77). Secara umum lembaga swadaya masyarakat memiliki sumber dana yang terbatas karena sumbangan anggota atau penduduk yang memiliki kemampuan terbatas, sehingga lembaga swadaya masyarakat berusaha mendapatkan bantuan dari pihak luar baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Karakteristik Perencanaan

Perencanaan pendidikan non formal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (pamong, tutor, fasilitator, warga belajar, pimpinan lembaga, dan masyarakat) dan sumber daya non-manusia (fasilitas, alat-alat, waktu, biaya, alam). Salah satu ciri umum yang dapat dilihat dari perencanaan pendidikan adalah perencanaan pendidikan selalu memperhatikan

masalah kebutuhan, situasi, dan tujuan, keadaan perekonomian, keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik (Udin Syaefudin & Abin Syamsuddin, 2005: 12). Sudjana mengemukakan perencanaan dalam pendidikan non formal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudjana, 2004: 59) : Pengambilan keputusan secara rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan; berorientasi pada perubahan dari masa sekarang pada keadaan yang diinginkan di masa mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai; melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan; memberikan arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta siapa pihak yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan itu; melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui atau akan dilaksanakan, meliputi kebutuhan, kemungkinan keberhasilan, sumber- sumber yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, serta kemungkinan resiko dari suatu tindakan yang akan dilakukan; berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang akan dilakukan. Prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi atau kepentingan, relevansi dengan kebutuhan, tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi; titik awal untuk arahan terhadap kegiatan pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan.

Prinsip Perencanaan Pendidikan Non Formal

Perencanaan sebagai kegiatan menyusun serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan perlu memperhatikan beberapa prinsip yang ada. Perencanaan program pendidikan non formal perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudjana, 2004: 102). Pertama, Perencanaan atau penyusunan program non formal harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber- sumber dan karakteristik

sasaran program; perencanaan disusun dengan memperhatikan rencana yang telah disusun, sehingga kegiatan yang direncanakan berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya; perencanaan program harus memanfaatkan sumber daya yang ada secara cermat dengan hasil seoptimal mungkin; menyeluruh artinya dalam perencanaan pendidikan non formal perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program seperti masukan, proses keluaran dan dampak pendidikan non formal. Kedua, perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis, menghasilkan serangkaian tindakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana langkah-langkah dalam perencanaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian (Sudjana, 2004:102).

Pada tahap persiapan meliputi kegiatan need assessment atau analisis kebutuhan. Tujuan dilakukannya identifikasi atau analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan program yang diinginkan masyarakat, mempermudah menyusun rencana program dan memperlancar pelaksanaan kegiatan (Sujarwo, 2007) analisis kebutuhan yang dilakukan mencakup berbagai aspek keberhasilan, kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber- sumber yang tersedia, sumber-sumber yang perlu disediakan, harapan dan aspirasi masyarakat. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan saat proses identifikasi adalah berkonsultasi dengan pejabat berwenang, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang dianggap membantu meminta pertimbangan dan persetujuan, menemukan data yang perlu dikumpulkan, melakukan teknik identifikasi, mempersiapkan sasaran di lapangan, menyiapkan instrument pengumpulan data (Sudjana, 2004:103). Tahap pelaksanaan merupakan tahap mewujudkan rencana yang telah tertulis dalam actions. Pada tahap pelaksanaan inilah yang akan menentukan apakah suatu rencana itu baik dan efektif. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana. Mengevaluasi proses hasil dan dampak program pembelajaran.

Kajian Model Kemitraan

Kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Secara umum kemitraan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Ambar Teguh, 2004: 129). Pengertian lainnya menurut Sentanoe Kertonegoro kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat (dalam Nana Rukmana, 2006: 60). Kemitraan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam posisi sederajat yang menjalin suatu ikatan didasarkan atas dasar saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Dari pengertian-pengertian di atas maka terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu kemitraan (Ambar Teguh, 2004: 130), yaitu: pertama, ada dua pihak atau lebih; kedua, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan; ketiga, ada kesepakatan; keempat, saling membutuhkan. Menjalinkan sebuah kemitraan hendaknya terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak-pihak yang menjalin kemitraan bukan sebaliknya saling merugikan antar pihak-pihak yang bermitra. "Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra" (Ambar Teguh, 2004: 130). Menjalinkan kemitraan sangat membutuhkan komitmen yang kuat dan seimbang antar pihak yang bermitra agar pihak yang bermitra dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang bermitra (Ambar Teguh, 2004: 130).

Prinsip Menjalinkan Kemitraan

Terdapat beberapa prinsip penting dalam menjalin sebuah kemitraan, yang tidak dapat diabaikan yaitu saling percaya antar Lembaga yang bermitra. (Nana Rukmana, 2006:63) Adapun 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan (Ditjen p21&PM dalam Kuswidanti, 2008) antara lain:

Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah kedudukannya. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Prinsip Keterbukaan

Organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

Prinsip Azas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)

Organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Model-model Kemitraan

Kemitraan memiliki model-model yang umumnya diterapkan antar lembaga. Model-model kemitraan dibedakan menjadi tiga (Ambar Teguh, 2004:130-131), yaitu :

Kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan salah satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan untuk tujuan apa semua itu dilakukan serta disepakati (Ambar Teguh, 2004: 130). Dengan demikian dapat diartikan bahwa kemitraan semu sebenarnya adalah kemitraan yang dilakukan dua belah pihak atau lebih, tetapi sebenarnya pihak yang bermitra tidak mengerti apa maksud kemitraan tersebut dan manfaat apa yang diperoleh dari kemitraan tersebut.

Kemitraan mutualistik

“Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Kemitraan melalui peleburan/konjugasi

Kemitraan konjugasi pada umumnya dilakukan oleh organisasi, agen-agen kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau tujuan organisasi (Ambar Teguh, 2004: 131). Organisasi/kelompok/ perorangan yang melakukan kemitraan konjugasi sama-sama membutuhkan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dan meningkatkan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup (Ambar Teguh, 2004:131) :

Subordinate Union of Partnership

Fenomena kemitraan seperti ini terjadi antara dua pihak atau lebih memiliki status,

kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Hubungan yang tercipta dalam kemitraan ini tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang, melainkan pada hubungan atas-bawah, kuat-lemah (Ambar Teguh, 2004: 131). Kemitraan dengan model ini menciptakan hubungan kemitraan yang terlihat seperti atasan dan bawahan. Lembaga yang lebih kuat berada di atas sedangkan lembaga yang lemah berada di bawah, sehingga tidak ada peran yang seimbang.

Linear Union of Partnership

Kemitraan linear union of partnership merupakan kerjasama yang dilakukan oleh organisasi atau para pihak yang memiliki kesamaan secara relative. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi status dan legalitas (Ambar Teguh, 2004: 132). Kemitraan tipe ini, organisasi atau pihak yang bermitra menciptakan hubungan yang sejajar atau seimbang, sehingga pihak-pihak yang bermitra dapat melakukan sharing dan memiliki peran atau fungsi yang seimbang Linear collaborative of partnership Kemitraan seperti ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas atau kekuatan para pihak yang bermitra. Kemitraan lebih menekankan pada visi misi yang saling mengisi satu dengan lainnya (Ambar Teguh, 2004: 132).

Kajian tentang Partisipasi

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi (Participation) merupakan peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan maupun menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Partisipasi juga dapat diartikan pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut serta terlibat dalam bentuk penyampaian

saran dan pendapat, barang, keterampilan bahan dan jasa (Fasli jalal & Dedi Supriadi, 2001: 201-202). Pengertian lain, partisipasi diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya (Siti Irine, 2011: 51). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran atau pendapat, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan maupun menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dapat dibedakan menjadi dua macam (Euis Sunarti, 2012):

Partisipasi langsung

Partisipasi secara langsung merupakan keikutsertaan seseorang secara langsung dalam proses partisipasi, misalnya dalam kegiatan pertemuan, diskusi, untuk mengajukan ide, pandangan atau pendapat

Partisipasi tidak langsung

Partisipasi tidak langsung merupakan keikutsertaan seseorang yang mewakilkan hak berpartisipasinya (sebagai contoh dalam pengambilan keputusan) ke orang lain yang kemudian dapat mewakilnya dalam aktivitas partisipatif pada tingkat yang lebih tinggi.

SPNF-SKB Kabupaten Bogor

Berdasarkan peraturan Bupati Bogor Nomor 45 tahun 2016 menetapkan tentang Pembentukan satuan Pendidikan non formal pada dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. SPNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal, sedangkan Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut (PNF) adalah layanan Pendidikan yang diselenggarakan untuk

memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan pemberdayaan. Pendidikan masyarakat yang selanjutnya disebut Dimas adalah layanan Pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat Pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dana atau meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sanggar Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan Pendidikan di daerah yang berbentuk satuan Pendidikan non formal.

Dalam meningkatkan kemajuan lembaga pendidikan non formal di suatu daerah, tentu diperlukan penguatan peran dan fungsi lembaga tersebut, diantaranya harus memiliki perencanaan yang matang, memiliki program yang fokus, mau merintis kerjasama dengan desa di wilayah binaannya, serta mampu menganalisis potensi desa tersebut berikut permasalahannya.

Sebagai contoh mengidentifikasi permasalahan di desa sasaran, seperti banyaknya pengangguran dan putus sekolah, mitra sasaran program seperti desa yang merupakan laboratorium pelaksanaan program desa vokasi, lembaga pendidikan non formal ini telah bergerak dalam pelayanan program Pendidikan yang unggul seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kesetaraan, Kursus, dan Pelatihan ketrampilan, dan berperan untuk meningkatkan kesejahteraan, Pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Untuk Pendidikan kesetaraan tepat sekali dengan merencanakan program desa vokasi, sehingga dapat mengatasi pengangguran bahkan putus sekolah. Oleh karenanya, butuh konsep dan tahapan dalam rangka mencapai program yang berkelanjutan, pemikiran, pelibatan akademisi, praktisi dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

Profile SPNF-SKB Kabupaten Bogor

Lembaga Sanggar Kegiatan Bersama di bawah Satuan Pendidikan Non formal (SPNF) sejak berdiri telah mengalami empat kali perubahan dan pindah lokasi, pertama merupakan pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) berlokasi di panti asuhan Cibalagung Kecamatan Ciomas, kemudian pindah ke desa Bubulak. Tahun 1978 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0202/0/1978 PLPM mengalami perubahan baik tugas dan fungsinya maupun organisasinya menjadi sanggar kegiatan belajar (SKB) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana percontohan program Pendidikan luar sekolah. Pemuda dan olahraga yang secara edukatif bertanggung jawab dan dibina oleh Direktur Pendidikan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan olahraga, dan berpindah lokasi dari desa Bubulak ke kecamatan Citeureup. Tahun 1983 SKB mempunyai bangunan sendiri di atas area seluas 30.000 M dan bangunan seluas 1360 M di desa Karadenan Cibinong Kecamatan Cibinong, tahun 2002 seiring dengan pemberlakuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah melalui penerapan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002, tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan kabupaten sebagai daerah otonom. Terbit surat keputusan Bupati Bogor No. II.E. Tahun 2002, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas fungsi dalam pembuatan percontohan dan pemberian pelayanan informasi berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga di kabupaten Bogor, bertanggung jawab dan dibina oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Tahun 2008 berdasarkan keputusan Bupati Bogor No. 48 UPTD SKB berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas dibidang

Pendidikan Non Formal dan Informasi di Kabupaten Bogor.

Visi dan Misi Lembaga SPNF-SKB

Visi Meningkatkan kualitas layanan dan kualitas penyelenggaraan program Pendidikan non-formal dan in-formal untuk mewujudkan Pendidikan yang berkeadilan, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Misi Pertama, Menjadikan UPT SKB sebagai pusat data Pendidikan non-formal dan in-formal; Kedua, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil program Pendidikan non-formal dan in-formal; Ketiga, Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan di bidang Pendidikan non-formal dan in-formal, Keempat, Meningkatkan kualitas dan jejaring kemitraan dalam penyelenggaraan program Pendidikan non formal dan in formal, Kelima, Meningkatkan minat peran serta masyarakat dan kemitraan dalam kegiatan Pendidikan non formal dan in formal. (<http://skbkabbogor.blogspot.com/p/lokasi-dan-fasilitas.html>)

Tugas dan Fungsi SPNF-SKB Kabupaten Bogor

Sesuai peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2008 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan Non-Formal dan In-Formal di Kabupaten Bogor.

Pendidikan non-formal, dan in-formal; pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, Pembina, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan Pendidikan non-formal dan in-formal; pelaksanaan uji coba program Pendidikan non-formal dan in-formal; pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Lembaga kursus dan masyarakat mengenai program percontohan program Pendidikan non-formal dan in-formal; pengelolaan sarana dan fasilitas belajar

Pendidikan non-formal dan in-formal; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Lokasi dan Fasilitas

Sejak tahun 1983 Unit Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) berlokasi di jalan SKB No.1 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan jarak 12 km ke Ibu Kota Kecamatan dan 4 km ke Ibu Kota Kabupaten. UPT SKB Kabupaten Bogor berdiri di atas lahan seluas 30.000 meter persegi dengan bangunan seluas 1.360 meter persegi.

Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Bogor, tersusun struktur organisasi UPT SKB sebagai berikut:

Adapun fungsi dari Lembaga SPNF-SKB adalah penyelenggaraan urusan ketatausahaan UPT; Penyusunan dan pengolahan data serta analisis kegiatan Pendidikan non-formal dan in-formal; pelayanan informasi, pengembangan model, dan pelaksana program percontohan Pendidikan non-formal dan in-formal; pelaksanaan pemberian motivasi dan bimbingan kepada masyarakat untuk menjadi tutor, fasilitator, pelatih, dan instruktur dalam kegiatan

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program-program pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat. UPT SKB Kabupaten Bogor perlu merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, UPT SKB Kabupaten Bogor mengalami kendala seperti permasalahan dana, fasilitas dan SDM yang terbatas. Agar dapat mengatasi kendala yang dialami, UPT SKB Kabupaten Bogor memerlukan konsep perencanaan program desa vokasi melalui model kemitraan untuk menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui implementasi model kemitraan yang dilaksanakan oleh UPT

SKB tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi UPT SKB Kabupaten Bogor sehingga program yang dilaksanakan dan dikembangkan dapat berjalan lebih optimal.

Model Konseptual Perencanaan Program Desa Vokasi di SPNF-SKB Kabupaten Bogor dilatarbelakangi oleh hasil perencanaan yang telah disusun, diantara Perencanaan program yang direncanakan adalah penyusunan program desa vokasi oleh lembaga SKB, perencanaan program kemitraan, dan implementasi model kemitraan. adalah melalui model kemitraan UPT SKB Kabupaten Bogor karena berdasarkan analisis kebutuhan dilapangan yaitu persoalan kebutuhan dana, fasilitas dan SDM, untuk mengotimalkan program, adanya komitmen dari lembaga untuk menjaga mutu program, serta menyalurkan lulusan program kecakapan hidup. Partisipasi Perencanaan program UPT SKB Kabupaten Bogor melibatkan pihak dari dalam lembaga dan luar lembaga, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai pembuat kebijakan. Perencanaan program kemitraan UPT SKB kabupaten Bogor diawali dengan kegiatan identifikasi oleh para pamong, mendengarkan masukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai pembuat kebijakan, dan selanjutnya penentuan prioritas program melalui rapat koordinasi antara UPT SKB Kabupaten Bogor dan pembuat kebijakan.

UPT SKB Kabupaten Bogor mengimplementasikan model kemitraan mutualistik dengan prinsip mutual benefit, yaitu kedua belah pihak yang bermitra sama-sama memperoleh manfaat dari kemitraan yang dilakukan. Manfaat yang diperoleh UPT SKB Kabupaten Bogor, yaitu mendapat dukungan sumber daya, dapat menyalurkan lulusan program dan dapat mengatasi kendala teknis dalam kegiatan. Seperti yang sudah dibahas pada bagian pendahuluan, sudah banyak program desa vokasi yang berhasil dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Beberapa program desa vokasi ada yang masih

bertahan, namun banyak juga yang sudah berhenti dengan sendirinya. Hal ini disebabkan desa vokasi yang dibentuk hanya menjadi tempat usaha bagi kelompok yang terbentuk, tidak dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup maupun berwirausaha bagi warga lainnya. Padahal konsep penyelenggaraan pelatihan kecakapan hidup adalah faktor utama keberhasilan program desa vokasi. Pada penelitian kali ini, peneliti berencana menawarkan model konseptual desa vokasi untuk lembaga SPNF-SKB Cibinong Kab. Bogor yang diharapkan dapat menjadi manager desa vokasi yang berkelanjutan di masa mendatang. Agar desa tersebut tidak hanya menjadi pusat home industri, akan tetapi juga mampu menjadi sentra pelatihan kecakapan hidup yang mampu menularkan keberhasilan membuka peluang usaha kepada warga lainnya, baik disekitar lokasi desa vokasi yang dibentuk maupun untuk warga dari desa lainnya. Adapun desa yang menjadi target desa vokasi adalah desa Cimandala Kabupaten Bogor.

Memperlihatkan model konseptual desa vokasi yang diusulkan pada kegiatan pengembangan program desa vokasi SPNF-SKB Cibinong Kab. Bogor. Pada tahap awal peneliti melakukan focus grup discussion (FGD) terkait program kegiatan pembentukan desa vokasi, bekerjasama dengan tim pendamping, mitra, masyarakat dan perangkat desa/pemerintah daerah. Tahap awal pembentukan desa vokasi dimulai dengan FGD bersama tim pengembang diantaranya tim dari perguruan tinggi dan dari tim SPNF-SKB Cibinong, kemudian melakukan sosialisasi program desa vokasi, analisis masalah, kendala penentuan desa target sasaran, kendala SDM/SDA, target lokasi sasaran, strategi mewujudkan desa vokasi, kendala permodalan, kendala birokrasi, kendala kemitraan, kendala rintisan usaha mandiri yang tidak berjalan optimal, penentuan solusi pemecahan masalah, pemilihan solusi alternatif dan eksekusi solusi alternatif yang sudah ditentukan bersama- sama.

Tahap selanjutnya adalah penentuan target lokasi sasaran berdasarkan hasil identifikasi di lapangan. Hasil dari pada penentuan target desa tersebut, dilakukan sosialisasi program desa vokasi, kemudian dilakukan FGD bersama SPNF-SKB, Perguruan Tinggi, mitra, masyarakat dan perangkat desa kemudian menganalisis potensi desa, penentuan solusi masalah, pemecahan masalah, pemilihan solusi alternatif, serta eksekusi solusi alternatif. Hasil dari FGD tersebut terbentuklah kelompok usaha, berdasarkan potensi usaha masyarakat, penentuan produk unggulan desa, serta penyusunan struktur pengurus desa vokasi, dari jajaran tim pengembang hingga pelaksana lapangan, dilanjutkan dengan pemberian pelatihan kecakapan hidup untuk berwirausaha kepada masyarakat dengan tutor pendidik dari SPNF-SKB Cibinong Kab. Bogor bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor divisi pembinaan kursus dan pelatihan pada masyarakat dan UKM, Menjalin kemitraan dengan dinas instansi terkait seperti dinas perindustrian, dinas perdagangan, koperasi syariah, UKM, dinas pariwisata, lembaga perbankan syariah, wedding organizer dan instansi terkait dengan pemasaran produk dan pengembangannya, Pendampingan kelompok usaha binaan SPNF-SKB Cibinong, bekerjasama dengan para mitra usaha dan perangkat desa, Pembentukan lembaga pelatihan kecakapan hidup secara mandiri oleh kelompok usaha binaan di bawah kendali SPNF-SKB Cibinong & Perguruan Tinggi sebagai manajer program Desa Vokasi, Desa vokasi mandiri yang menjadi sentra usaha masyarakat sekaligus sentra pelatihan kecakapan hidup di bawah pengawasan perguruan tinggi & SPNF-SKB Cibinong Kab. Bogor.

Kesimpulan

Putu Sudira, *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*, Yogyakarta: UNY Press, 2012, cet.I.hlm.I.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Petunjuk

Pelaksanaan Bantuan Sosial Desa Vokasi Juklak, 2013.

Ivan Hanafi, Pendidikan Teknik dan Vokasional, Bandung: Refika Aditama, 2014).

Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru,2012).

Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Suciati, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan Studi Terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<http://skb-kabbogor.blogspot.com/p/struktur-organisasi.htm>

Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni. 2011.